

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan berbagai dokumen perencanaan yang terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja (Renja) SKPD dokumen perencanaan SKPD untuk periode (1) satu tahun.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, wajib memiliki dokumen perencanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD. Proses penyusunan Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas, pertama persiapan penyusunan Renja SKPD, dengan agenda kerja pembentukan tim penyusunan Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi. Kedua penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi tahapan kegiatan perumusan rancangan Renja SKPD dan tahapan penyajian rancangan Renja SKPD.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/484.a/BAPPEDA-II/2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerinth Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019. Renja SKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui perkembangan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja diperlukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen Renja tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2019 Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022;
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunann Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Renstra Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022;
23. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/484.a/BAPPEDA-II/2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerinth Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Triwulan IV, adalah:

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022;
2. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan tahun 2019.
3. Melakukan evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan pembangunan dalam Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

1.4 Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran

Rumusan program dan kegiatan Dinas Kehutanan dalam Renja tahun 2019 disesuaikan dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022, Renja tersebut juga dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Jumlah program dan kegiatan dalam renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 terdiri atas 4 (empat) program dengan 28 (Dua puluh delapan) kegiatan. Untuk melaksanakan Renja tahun 2019 jumlah pagu dana indikatif sebesar Rp.11.063.643.150,- (Sebelas milyar enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Pagu sejumlah Rp.7.650.958.650,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan Pagu sejumlah Rp.3.412.684.500'- (Tiga milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Pada Triwulan IV terdapat perubahan Anggaran 2019 pada DPA Dinas Kehutanan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah pagu sebesar Rp.14.367.281.900 (Empat belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas 4 (empat) program dengan 37 (Tiga puluh tujuh) kegiatan, Pagu Anggaran tersebut sebesar Rp.8.755.052.150,- (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pagu Anggaran sejumlah Rp.3.412.684.500,- (Tiga milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Pagu sejumlah Rp.2.199.545.750,- (Dua milyar seratus sembilan puluh

sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH-DR).

Untuk program kegiatan tahun 2019 sudah terakomodir di dalam Renstra Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat di lihat dalam tabel 1 (satu) Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Tabel 1

Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Kinerja Renja OPD Tahun 2019
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|---|--|---|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung teknis kegiatan dinas | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | Persentase peningkatan disiplin Aparatur | Pangkalpinang | 100 % | 4.678.298.000 | 5.076.992.054 | PAD | Aparatur | |
| | | 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan | Pangkalpinang | 100 % | 3.493.930.000 | 3.577.436.054 | PAD | Aparatur | |
| | | 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan | Pangkalpinang | 100 % | 997.790.000 | 1.292.977.500 | PAD | Aparatur | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|---------|--|--|--|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (25 Orang) | Pangkalpinang (6 Kabupaten) | 100% | 167.445.500 | 167.445.500 | PAD | Aparatur | |
| | | 4. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah dokuman perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah daerah diatas 85% | Pangkalpinang | 85 % | 3.985.000 | 3.985.000 | PAD | Aparatur | |
| | | 5. Penyusunan Sistem Database Kehutanan berbasis IT | Tersusunnya Database Kehutanan kedalam aplikasi | Pangkalpinang (Kabupaten Bangka Selatan) | 1 Aplikasi | 6.953.000 | 26.953.000 | PAD | Aparatur | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------|---|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistennya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah | Pangkalpinang | 85% | 8.195.000 | 8.195.000 | PAD | Aparatur | |
| 2 | Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan di Prov. Kep. Bangka Belitung | Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 20 persentase izin usaha hasil hutan kayu | 2.179693.650 | 2.079.635.096 | PAD | | |
| | | 1. Pemanfaatan Kawasan Hutan | Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | Pangkalpinang | 8 Laporan | 54.889.150 | 54.889.150 | PAD | Pemegang Izin Usaha di Kawasan Hutan Negara dan Aparatr | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|---------|---|---|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|--|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | | | | | Kahutanan | |
| | | 2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu | Terlaksananya pengujian inokulan dan pengembangan teh dan kandungan pucuk serta daun tanaman Gaharu dan Pelawan | Pangkalpinang | 2 Unit | 226.471.500 | 145.280.000 | PAD | Hutan tanaman dan Hutan Alam pada tanaman Gaharu dan Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung | |
| | | 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan | Jumlah dokumen pengelolaan Kawasan hutan | Pangkalpinang | 8 Dokumen | 97.825.000 | 100.625.000 | PAD | Aparatur dan pihak terkait lainnya | |
| | | 4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu | Jumlah wasganis/ganis yang mendapatkan sertifikat ulang | Pangkalpinang | 20 Orang | 64.859.000 | 47.312.000 | PAD | Aparatur Kehutanan, Pemilik Izin / Pelaku Usaha & pihak terkait | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|---------|--|---|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | 5. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan | Terlaksananya keikutsertaanda lam Expo pengembangan dan Promosi Hasil Hutan | Samarinda | 1 Kali | 335.650.000 | 331.529.946 | PAD | Aparatur dan Stakeholde r | |
| | | 6. Pengadaan kendaraan roda dua (R2) UPTD KPH (DAK) | Tersedianya alat- alat angkutan darat bermotor sepeda motor UPTD KPH | 3 Kabupaten | 5 Unit | 200.000.000 | 200.000.000 | DAK | Aparatur | |
| | | 7. Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan | Terbangunnya sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan | Prov. Bangka belitung | 20 Hektar | 200.000.000 | 212.315.000 | PAD | Aparatur dan Stakeholde r | |
| | | 8. Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK) | Terbangunnya kantor resort UPTD KPH | 3 Kabupaten | 2 Unit | 987.684.000 | 987.684.000 | DAK | Aparatur | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|---|---|---|---------------------|--|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 3 | Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem | | | 20% persent asi Kawasa n Ekosiste n Essensia I (KEE) | 1.220.127.000 | 1.635.120.000 | | | |
| | | 1. Penertiban pelanggaran tindak pidana kehutanan | Berkurangnya tindak pidana kehutanan | 6 Kabupaten | 2 berkas perkara | 23.500.000 | 23.560.000 | PAD | Aparatur | |
| | | 2. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan | Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan | 6 Kabupaten | 30% | 212.932.000 | 156.032.000 | PAD | Aparatur | |
| | | 3. Masyarakat mitra polisi kehutanan | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyampaikan informasi kegiatan kehutanan di Daerah | Provinsi Kep. Babel | 60 Orang | 307.160.000 | 307.160.000 | PAD | Aparatur | |
| | | 4. Penyelenggaraa n | Terlaksananya perlindungan | Provinsi Kep. Babel | 90% | 186.740.000 | 186.740.000 | PAD | Aparatur dan | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|----------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | perlindungan dan pengamanan hutan oleh polhut | dan pengamanan hutan oleh POLHUT | | | | | | stakeholder | |
| | | 5. Tenaga pendukung polisi hutan | Tersedianya tenaga pendukung perlindungan hutan dan hasil hutan yang responsif Gender | Provinsi Kep. Babel | 15 Orang | 458.980.000 | 500.980.000 | PAD | Aparatur dan pemangku kepentingan | |
| | | 6. Identifikasi dan inventarisasi kawasan ekosistem Essensial | Jumlah Kawasan Ekosistem Essensial yang terbentuk dan terjaga | Pulau Bangka dan P. Belitung | 2 Kawasan | 30.755.000 | 30.755.000 | PAD | Aparatur dan pemangku kepentingan | |
| | | 7. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH-Kehutanan) | | | | 0 | 429.893.000 | DBH Kehutanan | | |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan DAS dan | Program Peningkatan Pengelolaan DAS | Tercapai kualitas bibit dan sumber | | 1 dokumen dan | 2.975.989.000 | 5.575.534.750 | | | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|--------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|---|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pemberdayaan Masyarakat | dan Pemberdayaan Masyarakat | benih yang berkualitas dan pengelolaan rehabilitasi yang tertata | | 20 Ha | | | | | |
| | | 1. Pembinaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai | Terrehabilitasi DAS yang kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 6 Kabupaten | 200 Ha | 68.644.000 | 68.644.000 | PAD | Pemegang IPPKH dan Masyarakat di DAS | |
| | | 2. Pemenuhan kewajiban Rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH | Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IPPKH se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pemenuhan kewajiban Rehabilitasi DAS | 4 Kabupaten | 6 Pemegang IPPKH | 2.555.000 | 2.555.000 | PAD | Pemegang IPPKH | |
| | | 3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan lahan | Terlaksananya pengembangan kualitas perbenihan tanaman hutan dan rencana pengelolaan | Provinsi dan 6 kabupaten | 1 dokumen dan 20 Ha | 82.830.000 | 82.830.000 | PAD | 3 lokasi sumber benih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|---------|---|--|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|--|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | RHL | | | | | | dan penangkar serta dokumen rehabilitasi hutan dan lahan | |
| | | 4. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan | Pusat, luar daerah dan 6 Kabupaten | 33 Orang dan 1 kali | 158.492.000 | 158.492.000 | PAD | Penyuluh kehutanan dan 7 kategori peserta lomba wana lestari | |
| | | 5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan dan luar kawasan hutan dan aksi puncak penanaman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Provinsi dan 6 kabupaten | 80 Hektar | 165.906.000 | 415.906.000 | PAD | Lahan kritis di Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bangka Belitung dan IPPKH atas nam Gubernur Kepulauan Bnagka Belitung | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|---------|--|---|--------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------|--|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | 6. Pengembangan perhutanan sosial | Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial yang responsif Gender | Provinsi dan 6 kabupaten | 6 KTH, 5HT R, 5HKm, 3 HD dan 1 Pokja | 272.562.000 | 422.562.000 | PAD | Penyuluh kehutanan, KTH Perhutanan sosial (HTR, HKm, HD dan Pemberdayaan masyarakat) dan pokja PPS | |
| | | 7. Pengembangan sarana dan prasarana Usaha Ekonomi produktif (DAK) | Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif | 6 Kabupaten | 2 Unit | 272.562.000 | 2.225.000.000 | DAK | Aparatur dan stakeholder | |
| | | 8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH-DR KEHUTANAN) | - DAS kritis yang direhabilitasi - luas kawasan Perhutanan Sosial | | Persentase DAS kritis yang direhabilitasi Persentase luas kawasan Perhuta | | 299.165.750 | DBH kehutanan | Aparatur | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|---------|---|--|--------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | nan Sosial | | | | | |
| | | 9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR KEHUTANAN) | - DAS kritis yang direhabilitasi - luas kawasan Perhutanan Sosial | Kabupaten Bangka | Persentase DAS kritis yang direhabilitasi Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial | | 103.355.000 | DBH kehutanan | Aparatur | |
| | | 10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sigambir Kotawaringin (DBH-DR KEHUTANAN) | - DAS kritis yang direhabilitasi - luas kawasan Perhutanan Sosial | Kabupaten Bangka | Persentase DAS kritis yang direhabilitasi Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial | | 55.895.000 | DBH kehutanan | Aparatur | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket | | |
|-----|---------|---|--|--------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------|--|--|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | |
| | | 11. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR KEHUTANAN) | - DAS kritis yang direhabilitasi - luas kawasan Perhutanan Sosial | Kabupaten Bangka Tengah | Persentase DAS kritis yang direhabilitasi Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial | | 342.000.000 | DBH kehutanan | Aparatur | | | |
| | | 12. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR KEHUTANAN) | - DAS kritis yang direhabilitasi - luas kawasan Perhutanan Sosial | Kabupaten Bangka Selatan | Persentase DAS kritis yang direhabilitasi Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial | | 193.670.000 | DBH kehutanan | Aparatur | | | |
| | | 13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Rambat Menduyung | - DAS kritis yang direhabilitasi - luas kawasan Perhutanan | Kabupaten Bangka Barat | Persentase DAS kritis yang direhabilitasi | | 122.745.000 | DBH kehutanan | Aparatur | | | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket | | |
|-----|---------|--|--|------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------|--|--|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | |
| | | (DBH-DR KEHUTANAN) | Sosial | | litasi Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial | | | | | | | |
| | | 14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Jebu Bembang Antar (DBH-DR KEHUTANAN) | - DAS kritis yang direhabilitasi - luas kawasan Perhutanan Sosial | Kabupaten Bangka Barat | Persentase DAS kritis yang direhabilitasi Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial | | 237.245.000 | DBH kehutanan | Aparatur | | | |
| | | 15. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Belantu Mendanau (DBH-DR KEHUTANAN) | - DAS kritis yang direhabilitasi - luas kawasan Perhutanan Sosial | Kabupaten Belitung | Persentase DAS kritis yang direhabilitasi Persentase luas kawasan | | 430.195.000 | DBH kehutanan | Aparatur | | | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-----|---|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | Perhutanan Sosial | | | | | |
| | | 16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Gunung Duren (DBH-DR KEHUTANAN) | - DAS kritis yang direhabilitasi - luas kawasan Perhutanan Sosial | Kabupaten Belitung Timur | Persentase DAS kritis yang direhabilitasi Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial | | 415.275.000 | DBH kehutanan | Aparatur | |
| 5 | Peningkatan pelayanan tata kelola hutan | Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan | | | 50 Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan oleh UPTD KPH | 9.535.000 | 0 | | | |
| | | 1. Penyelesaian Usulan Perubahan Status | Persentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH | Prov. Kep. Bangka Belitung | 50 % | 9.535.000 | 0 | PAD | Aparatur dan Pemangku Kepentingan | |

| No | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | | Kelompok Sasaran | Ket |
|-------|---------|----------------------|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Pagu Perubahan (Rp) | Sumber Dana | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | Kawasan Hutan/Tora | | | | | | | n | |
| TOTAL | | | | | | 11.063.643.150 | 14.367.281.900 | | | |

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2019 TRIWULAN IV

2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan dalam Renja Tahun 2019 Terhadap Program/Kegiatan dalam Renstra

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 7 *“renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”*, mengamanatkan SKPD untuk memiliki Renstra SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Setelah Renstra SKPD ditetapkan, untuk melaksanakan program kegiatan setiap tahun, maka ditetapkan Rencana Kerja (Renja) SKPD, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 melaksanakan 4 (empat) program dengan 28 (Dua puluh delapan) kegiatan. Keempat program kegiatan tersebut adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2. Program Peningkatan Tata Kelola Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, 3. Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi SDA Dan Ekosistem, 4. Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pada Program Pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 6 (enam) kegiatan, terdiri dari kegiatan pelayanan administrasi perkantoran; kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur; kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan; kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; kegiatan penyusunan sistem database kehutanan berbasis IT.

Pada program peningkatan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan pada Triwulan IV (empat) melaksanakan 8 (delapan) kegiatan, terdiri dari kegiatan pemanfaatan kawasan hutan; kegiatan pengembangan hasil hutan bukan kayu; kegiatan penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan; kegiatan peningkatan usaha hasil hutan kayu; kegiatan

expo pengembangan dan promosi hasil hutan; kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehutanan); kegiatan Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK); kegiatan Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan.

Pada Program Peningkatan Perlindungan dan konservasi SDA dan ekosistem pada triwulan IV (empat) melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, yaitu kegiatan penerbitan pelanggaran tindak pidana kehutanan; kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; kegiatan masyarakat mitra polisi kehutanan; kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan dan POLHUT; kegiatan tenaga pendukung polisi hutan; kegiatan indentifikasi dan inventarisasi kawasan ekosistem essensial; kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH-Kehutanan).

Pada program peningkatan pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat pada Triwulan IV (empat) 16 (enam belas kegiatan, yaitu: kegiatan Pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai; kegiatan pemenuhan kewajiban rehabilitasi hutan dan pemegang IPPKH; kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan; kegiatan penyelenggaraan penyuluh kehutanan; kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; kegiatan pengembangan perhutanan sosial; kegiatan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK); kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH-DR KEHUTANAN); kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR KEHUTANAN), kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sigambir Kotawaringin (DBH-DR KEHUTANAN); kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR KEHUTANAN); kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR KEHUTANAN); kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR KEHUTANAN); kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Jebu Bembang Antar (DBH-DR KEHUTANAN); kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Belantu Mendanau (DBH-DR KEHUTANAN); kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Gunung Duren (DBH-DR KEHUTANAN).

Program peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan pada triwulan IV (empat) terdapat perubahan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TORA ditiadakan /dihilangkan.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sesuai dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022, namun ada beberapa kegiatan yang tidak ada dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 yang merupakan penambahan kegiatan baru sesuai arahan dari Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasil penyesuaian kebutuhan pelaksanaan fungsi urusan kehutanan, antara lain : koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah dan kegiatan rutin lainnya.

Target dan realisasi (kinerja dan keuangan) Triwulan IV yang terdapat dalam Renja Dinas Kehutanan Tahun 2019 telah mengacu kepada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022, namun ada beberapa kegiatan yang target dan realisasi keuangannya tidak sesuai dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 disebabkan adanya penyesuaian dengan keadaan kemampuan keuangan Daerah.

Untuk gambaran perbandingan kesesuaian antara program/kegiatan yang tercantum dalam Renja dengan Renstra, dapat dilihat pada tabel 2 (dua) berikut ini :

Tabel 2
Perbandingan Kesesuaian Program/Kegiatan
Antara Renja Tahun 2019 dengan Renstra 2017–2022

OPD : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Renja 2019 | | Renstra 2017 - 2022 | | Ket |
|----|---|---|---|---|--------|
| | Program | Kegiatan | Program | Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | | Sesuai |
| | | 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran | Sesuai |
| | | 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Sesuai |
| | | 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Sesuai |
| | | 4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan | | 4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan | Sesuai |
| | | 5. Penyusunan Pelaporan | | 5. Penyusunan Pelaporan | Sesuai |

| No | Renja 2019 | | Renstra 2017 - 2022 | | Ket |
|----------|--|--|--|--|---------------|
| | Program | Kegiatan | Program | Kegiatan | |
| | | Capaian Kinerja dan Keuangan | | Capaian Kinerja dan Keuangan | |
| | | 6. Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT | | 6. Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT | Sesuai |
| 2 | Program peningkatan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan | | Program peningkatan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan | | Sesuai |
| | | 1. Pemanfaatan Kawasan Hutan | | 1. Pemanfaatan Kawasan Hutan | Sesuai |
| | | 2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu | | 2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu | Sesuai |
| | | 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan | | 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan | Sesuai |
| | | 4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu | | 4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu | Sesuai |
| | | 5. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Balikpapan Hutan | | 5. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Balikpapan Hutan | Sesuai |
| | | 6. Pengadaan Kendaraan Roda Dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehutanan) | | 6. Pengadaan Kendaraan Roda Dua (R-2) UPTD KPH | Sesuai |
| | | 7. Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan | | 7. Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan | Sesuai |
| | | 8. Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK) | | 8. Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK) | Sesuai |

| No | Renja 2019 | | Renstra 2017 - 2022 | | Ket |
|-----------|--|---|--|---|---------------|
| | Program | Kegiatan | Program | Kegiatan | |
| 3 | Program peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dan Ekosistem | | Program peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dan Ekosistem | | Sesuai |
| | | 1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pindana Kehutanan | | 1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pindana Kehutanan | Sesuai |
| | | 2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | | 2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | Sesuai |
| | | 3. Masyarakat mitra polisi kehutanan | | 3. Masyarakat mitra polisi kehutanan | Sesuai |
| | | 4. Penyelenggaraaa n Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT | | 4. Penyelenggaraaa n Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT | Sesuai |
| | | 5. Tenaga Pendukung Polisi Hutan | | 5. Tenaga Pendukung Polisi Hutan | Sesuai |
| | | 6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial | | 6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial | Sesuai |
| | | 7. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH- Kehutanan) | | 7. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH- Kehutanan) | Sesuai |
| 4. | Program peningkatan pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat | | Program peningkatan pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat | | Sesuai |
| | | 1. Pembinaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | | 1. Pembinaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | Sesuai |

| No | Renja 2019 | | Renstra 2017 - 2022 | | Ket |
|----|------------|---|---------------------|---|--------|
| | Program | Kegiatan | Program | Kegiatan | |
| | | 2. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi 4 Kabupaten Pemegang IPPKH | | 2. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi 4 Kabupaten Pemegang IPPKH | Sesuai |
| | | 3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | | 3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Sesuai |
| | | 4. Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan | | 4. Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan | Sesuai |
| | | 5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan | | 5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Sesuai |
| | | 6. Pengembangan Perhutanan Sosial | | 6. Pengembangan Perhutanan Sosial | Sesuai |
| | | 7. Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK) | | 7. Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK) | Sesuai |
| | | 8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH-DR KEHUTANAN) | | 8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH-DR KEHUTANAN) | Sesuai |
| | | 9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR KEHUTANAN) | | 9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR KEHUTANAN) | Sesuai |
| | | 10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sigambir Kotawaringin (DBH-DR KEHUTANAN) | | 10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sigambir Kotawaringin (DBH-DR KEHUTANAN) | Sesuai |
| | | 11. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR KEHUTANAN) | | 11. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR KEHUTANAN) | Sesuai |
| | | 12. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR KEHUTANAN) | | 12. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR KEHUTANAN) | Sesuai |
| | | 13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan | | 13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Sesuai |

| No | Renja 2019 | | Renstra 2017 - 2022 | | Ket |
|----------|---|--|---|--|---------------|
| | Program | Kegiatan | Program | Kegiatan | |
| | | di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR KEHUTANAN) | | di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR KEHUTANAN) | |
| | | 14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Jebu Bembang Antar (DBH-DR KEHUTANAN) | | 14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Jebu Bembang Antar (DBH-DR KEHUTANAN) | Sesuai |
| | | 15. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Belantu Mendanau (DBH-DR KEHUTANAN) | | 15. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Belantu Mendanau (DBH-DR KEHUTANAN) | Sesuai |
| | | 16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Gunung Duren (DBH-DR KEHUTANAN) | | 17. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Gunung Duren (DBH-DR KEHUTANAN) | Sesuai |
| 5 | Program Peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan | | Program Peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan | | Sesuai |
| | | 1. Penyelesaian Usulan Perubahan Status kawasan hutan/TORA | | 1. Penyelesaian Usulan Perubahan Status kawasan hutan/TORA | Sesuai |

Tabel 3
Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja
Triwulan IV Tahun 2019

OPD : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Renja 2019 | | | Keuangan | | | |
|----------|--|----------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Program/Kegiatan | Target Kinerja | Indikator Capaian Kinerja | Pagu DPA (Rp) | Pagu DPPA (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | 100 % | Persentase peningkatan disiplin Aparatur | 4.678.298.500 | 5.076.992.054,00 | 4.464.693.288,00 | 87,94 |
| | Kegiatan : | | | | | | |
| | 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan | 3.493.930.000 | 3.577.436.054,00 | 3.398.339.818,00 | 94,99 |
| | 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 % | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan | 997.790.000 | 1.292.977.500 | 913.862.905,00 | 70,68 |
| | 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (25 Orang) | 167.445.500 | 167.445.500 | 119.428.515,00 | 71,32 |
| | 4. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 85 % | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target di atas 90% | 3.985.000 | 3.985.000 | 2.450.000 | 61,48 |

| No | Renja 2019 | | | Keuangan | | | |
|----|--|---|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| | Program/Kegiatan | Target Kinerja | Indikator Capaian Kinerja | Pagu DPA (Rp) | Pagu DPPA (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 5. Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT | 1 Aplikasi | | 6.593.000 | 26.953.000 | 23.662.0500 | 87,79 |
| | 6. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan | 85% | Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan PD dengan tingkat konsistennya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85 % | 8.195.000 | 8.195.000 | 6.950.000 | 84,81 |
| 2. | Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | 5 persentase izin usaha hasil hutan kayu | Persentase (%) | 2.179.693.6500 | 2.079.635.096 | 1.948.857.461,98 | 93,71 |
| | Kegiatan : | | | | | | |
| | 1. Pemanfaatan Kawasan Hutan | 95% | Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | 54.889.1500 | 54.889.1500 | 44.930.2500 | 81,86 |
| | 2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu | 2 Unit | Terlaksananya pengujian inokulan dan pengembangan teh dan kandungan pucuk serta daun tanaman Gaharu dan Pelawan | 226.471.500 | 145.280.000 | 103.995.100 | 71,58 |
| | 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan | 8 Dokumen | Jumlah dokumen pengelolaan Kawasan | 97.825.000 | 100.625.000 | 99.458.600 | 98,84 |

| No | Renja 2019 | | | Keuangan | | | |
|-----------|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | Program/Kegiatan | Target Kinerja | Indikator Capaian Kinerja | Pagu DPA (Rp) | Pagu DPPA (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Hutan | | hutan | | | | |
| | 4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu | 20 Orang | Jumlah wasganis/ganis yang mendapatkan sertifikat ulang | 64.859.000 | 47.312.000 | 46.889.200 | 99,11 |
| | 5. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan | 1 Kali | Terlaksananya keikutsertaandalam Expo pengembangan dan Promosi Hasil Hutan | 335.650.000 | 331.529.946 | 331.191.746,00 | 99,90 |
| | 6. Pengadaan Kendaraan roda dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehutanan) | 2 unit | Tersedianya alat- alat angkutan darat bermotor sepeda motor UPTD KPH | 200.000.000 | 200.000.000 | 165.182.500 | 82,59 |
| | 7. Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan | 20 Hektar | Terbangunnya sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan | 212.315.000 | 212.315.000 | 211.046.500 | 99,40 |
| | 8. Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK) | 5 unit | Terbangunnya kantor resort UPTD KPH | 987.684.000 | 987.684.000 | 946.163.565,98 | 95,80 |
| 3. | Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem | 20% persentasi Kawasan Ekosisten Essensial (KEE) | Persentase (%) | 1.220.127.000 | 1.635.120.000 | 1.561.253.8600 | 95,48 |
| | Kegiatan : | | | | | | |
| | 1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pindan Kehutanan | 2 berkas perkara | Berkurangnya tindak pidana kehutanan | 23.560.000 | 23.560.000 | 2.080.000 | 8,83 |
| | 2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | 30% | Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan | 212.932.000 | 156.032.000 | 152.337.000 | 97,63 |
| | 3. Masyarakat Mitra Polisi | Provinsi | Meningkatnya peran serta | 307.160.000 | 307.160.000 | 305.480.000 | 99,45 |

| No | Renja 2019 | | | Keuangan | | | |
|----|--|----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| | Program/Kegiatan | Target Kinerja | Indikator Capaian Kinerja | Pagu DPA (Rp) | Pagu DPPA (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kehutanan | Kepulauan Bangka Belitung | masyarakat dalam menyampaikan informasi kegiatan kehutanan di Daerah | | | | |
| | 4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT | 90% | Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan oleh POLHUT | 186.740.000 | 186.740.000 | 181.486.600 | 97,19 |
| | 5. Tenaga Pendukung Polisi Hutan | 15 Orang | Tersedianya tenaga pendukung perlindungan hutan dan hasil hutan yang responsif Gender | 458.980.000 | 500.980.000 | 492.883.600 | 98,38 |
| | 6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial | 2 Kawasan | Jumlah Kawasan Ekosistem Essensial yang terbentuk dan terjaga | 30.755.000 | 30.755.000 | 23.555.000 | 76,59 |
| | 7. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH-Kehutanan) | | | - | 429.893.000 | 403.431.6600 | 93,84 |
| 4. | Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 dokumen dan 20 Ha | Tercapai kualitas bibit dan sumber benih yang berkualitas dan pengelolaan rehabilitasi yang tertata | 2.975.989.000 | 5.575.534.750 | 3.206.572.633,00 | 94,98 |
| | Kegiatan : | | | | | | |
| | 1. Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai | 200 Ha | Terrehabilitasi DAS yang kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 68.644.000 | 68.644.000 | 49.711.500 | 72,42 |

| No | Renja 2019 | | | Keuangan | | | |
|----|--|-------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|------------|
| | Program/Kegiatan | Target Kinerja | Indikator Capaian Kinerja | Pagu DPA (Rp) | Pagu DPPA (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH | 6 Pemegang IPPKH | Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IPPKH se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pemenuhan kewajiban Rehabilitasi DAS | 2.555.000 | 2.555.000 | 2.330.000 | 91,19 |
| | 3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 1 dokumen dan 20 Ha | Terlaksananya pengembangan kualitas perbenihan tanaman hutan dan rencana pengelolaan RHL | 82.830.000 | 82.830.000 | 61.104.400 | 73,77 |
| | 4. Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan | 33 Orang dan 1 kali | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan | 158.492.000 | 158.492.000 | 135.878.700 | 85,73 |
| | 5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 80 Hektar | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan dan luar kawasan hutan dan aksi puncak penanaman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 165.906.000 | 415.906.000 | 341.433.500 | 82,09 |
| | 6. Pengembangan Perhutanan Sosial | 6 KTH, 5HTR, 5HKm, 3 HD dan 1 Pokja | Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial yan responsif Gender | 272.562.000 | 422.562.000 | 243.628.291,00 | 57,66 |
| | 7. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK) | 2 unit | Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif | 2.225.000.000 | 2.225.000.000 | 497.478.631,00 | 22,36 |

| No | Renja 2019 | | | Keuangan | | | |
|----|---|----------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| | Program/Kegiatan | Target Kinerja | Indikator Capaian Kinerja | Pagu DPA (Rp) | Pagu DPPA (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH-DR KEHUTANAN) | | | - | 299.165.7500 | 227.910.7500 | 76,18 |
| | 9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR KEHUTANAN) | | | - | 103.355.000 | 92.703.500 | 89,69 |
| | 10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sigambir Kotawaringin (DBH-DR KEHUTANAN) | | | - | 55.895.000 | 00 | - |
| | 11. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR KEHUTANAN) | | | - | 342.000.000 | 278.976.775,00 | 81,57 |
| | 12. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR KEHUTANAN) | | | - | 193.670.000 | 167.489.379,00 | 86,48 |
| | 13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR KEHUTANAN) | | | - | 122.745.000 | 111.030.000 | 90,46 |
| | 14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Jebu Bembang Antar (DBH-DR KEHUTANAN) | | | - | 237.245.000 | 214.391.100 | 90,37 |
| | 15. Rehabilitasi Hutan dan | | | - | 430.195.000 | 397.445.664,00 | 92,39 |

| No | Renja 2019 | | | Keuangan | | | |
|----|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | Program/Kegiatan | Target Kinerja | Indikator Capaian Kinerja | Pagu DPA (Rp) | Pagu DPPA (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Lahan di KPHP Belantu Mendanau (DBH-DR KEHUTANAN) | | | | | | |
| | 16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Gunung Duren (DBH-DR KEHUTANAN) | | | - | 415.275.000 | 385.060.443,00 | 92,72 |
| 5. | Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan | 50 Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan oleh UPTD KPH | Persentase (%) | 9.535.000 | 0 | 0 | |
| | Kegiatan : | | | | | | |
| | 1. Penyelesaian Usulan Perubahan Status kawasan hutan/TORA | 50% | Penyelesaian Usulan Perubahan Status kawasan hutan/TORA | 9.535.000 | 0 | 0 | |
| | | | Total | 11.063.643.000 | 14.367.281.900 | 11.181.377.242,98 | 77,83 |

Jumlah keseluruhan pagu anggaran Tahun 2019 untuk Belanja Langsung sebesar **Rp.11.063.643.1500,-** (Sebelas milyar enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah). Pada Triwulan IV Tahun 2019 terdapat perubahan Anggaran menjadi sebesar **Rp.14.367.281.900** (Empat belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), untuk realisasi keuangan sebesar **Rp.11.181.377.242,98** (Sebelas milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah) dengan persentase sebesar 77,83 %

BAB III

KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT

3.1 Kendala

Beberapa kendala dan permasalahan teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja, antara lain :

1. Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan (KPH), seharusnya dibentuk 13 unit sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor 797 Tahun 2012, saat ini baru terbentuk 8 (delapan) UPTD;
2. Luas kawasan hutan (kritis dan sangat kritis mencapai 20.688 hektar (1,2%), kriteria agak kritis (392.437 hektar) dan potensial kritis (794.718 hektar), berdasarkan review lahan kritis Tahun 2018 oleh BPDAS Baturusa Cerucuk, perlu dilaksanakan perlindungan dan upaya Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
3. Laju kerusakan kawasan hutan lebih tinggi dibanding upaya perbaikan/reboisasi/reklamasi, hal tersebut salah satunya disebabkan Personil pengamanan dan perlindungan hutan (Polhut, PPNS, Penyuluh) beserta sarpras penunjang masih belum mencukupi rasio yang sesuai, menyebabkan tingginya gangguan keamanan terhadap kawasan hutan dan hasil-hasil hutan;

3.2 Saran Tindak Lanjut

Untuk bisa mencapai target dan realisasi kinerja dan anggaran/keuangan secara maksimal maka perlu diadakan beberapa hal, antara lain :

1. Perlunya penempatan pegawai pada Dinas Kehutanan dengan sesuai kompetensi dan keahlian pegawai yang bersangkutan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih maksimal dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal;
2. Perlunya pembangunan sarana dan prasarana aparatur yang lengkap dan mendukung, terutama Gedung Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Peningkatan koordinasi antara Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta stake holder terkait, untuk kerjasama menyelesaikan permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan hasil hutan;
4. Meningkatkan kinerja bagi pelaksana kegiatan sesuai dengan target capaian yang ditentukan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan;

BAB IV

KESIMPULAN

Setelah dilaksanakan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Triwulan IV, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, disusun untuk mendukung mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja 2019 pada Triwulan IV untuk pagu Belanja Langsung sebesar **Rp.14.367.281.900** (Empat belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), untuk realisasi keuangan sebesar **Rp.11.181.377.242,98** (Sebelas milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah) dengan persentase sebesar 77,83 %.

Demikian Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Triwulan IV Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semoga dapat menjadi bahan tindak lanjut. Terimakasih.

Pangkalpinang, Desember 2019

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

H. MARWAN, S. Ag.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700814 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i

Daftar Isi.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum.....2

1.3 Maksud dan Tujuan.....3

1.4 Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok
Sasaran.....4

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

2.1 Perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan
Renstra Perangkat Daerah.....21

2.2 Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan Renja
Perangkat Daerah.....28

2.3

BAB III KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT

3.1 Kendala.....35

3.1 Saran dan Tindak Lanjut.....35

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....37

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kewenangan Dinas Kehutanan diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, wajib memiliki dokumen perencanaan Renstra SKPD. Proses penyusunan Renja SKPD Dinas Kehutanan provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas, pertama persiapan penyusunan Renja SKPD, dengan agenda kerja pembentukan tim penyusunan Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi. Kedua penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi tahapan kegiatan perumusan rancangan Renja SKPD dan tahapan penyajian rancangan Renja SKPD.

Untuk mengetahui perkembangan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja diperlukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen Renja tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

H.MARWAN,S.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19700814 199203 1 002



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KEHUTANAN

EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN IV

TAHUN 2019

PANGKALPINANG